

# JURNAL

## EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (JEPP)

Volume : 04. NO. 04, JULI - DESEMBER 2012



ISSN 1979-7338

### PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA: PENERAPAN MODEL KEBIJAKAN PRIORITAS SEKTORAL PROPINSI BENGKULU

Mintargo

### ARAH PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR PROVINSI DI WILAYAH BELAJASUMBA

Roosemarina A. Rambe, Derry Utama Andre Wigun

### PENGARUH KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Lismawati

### ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU

Reni Yulita Sari, Handoko Hadiyanto, Lela Rospida

### ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2007-2011

Ahmad Soleh

### ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN NASAL KABUPATEN KAUR PROPINSI BENGKULU

Elyan Jumedi, Ketut Sukiyono, Edy Rahmanty, T. H

### ANALISIS PARTISIPASI PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan  
Di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong)

Yoga Firdiansyah, Heri Sunaryanto, Aris almahmudi

### STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU DALAM RANGKA REVITALISASI KONDISI SOSIAL EKONOMI DI PROPINSI BENGKULU

Afri Candriani, Handoko Hadiyanto, Bambang Agoes Hermanto

PENERBIT PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BENGKULU  
Gedung S Jln. Raya Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu  
Telp 0736 - 28481 Fax: 0736 - 28481 email: [mppunib@yahoo.com](mailto:mppunib@yahoo.com)

**JURNAL**  
**EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**VOLUME : 04. NO. 04, JULI - DESEMBER 2012**

**ISSN: 1979-7338**

- PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA: PENERAPAN MODEL  
KEBIJAKAN PRIORITAS SEKTORAL PROPINSI BENGKULU**  
**Mintargo** ..... 1-14
- ARAH PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR PROVINSI  
DI WILAYAH BELAJASUMBA**  
**Roosemarina A. Rambe, Derry Utama Andre Wiguna** ..... 15-22
- PENGARUH KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**  
**Lismawati** ..... 23-31
- ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS  
KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU**  
**Reni Yulita Sari, Handoko Hadiyanto, Lela Rospida** ..... 32-40
- ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2007-2011**  
**Ahmad Soleh** ..... 41-51
- ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN NASAL  
KABUPATEN KAUR PROPINSI BENGKULU**  
**Elyan Jumedi, Ketut Sukiyono, Edy Rahmanty, T. H.** ..... 52-61
- ANALISIS PARTISIPASI PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan  
Di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong)**  
**Yoga Firdiansyah, Heri Sunaryanto, Aris Almahmudi** ..... 62-72
- STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA TERPADU DALAM RANGKA  
REVITALISASI KONDISI SOSIAL EKONOMI DI PROPINSI BENGKULU**  
**Afri Candriani, Handoko Hadiyanto, Bambang Agoes Hermanto** ..... 73-82

# **PENGARUH KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**By**

Lismawati

## **ABSTRACT**

This study aimed to examine the effect of human resources ability against the reliability and timeliness of financial reporting of local government. The research sample is the official agency of local government in local government consisting of the departments and offices. Data collection is done by giving the questionnaire totaled 72 to the head and finance staff in Rejang Lebong SKPD.

The data collected were processed using SPSS version 16. The results in the first model with linear regression showed a positive effect of human resources ability against the reliability of financial reporting. After that the results of the study in the second model with a linear regression that has been done showing the positive effect of human resources ability on the timeliness of financial reporting. **Keywords:** Human Performance, Reliability, Timeliness and Local Government Financial Reporting

***Keywords: Human Resources, Reliability, Timeliness and Local Government Financial Reporting***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai sebuah entitas pelayan publik, Pemerintah Daerah perlu mempertanggungjawabkan anggaran dan kinerjanya. Bentuk paling utama dari pertanggungjawaban tersebut adalah penerbitan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Undang-

undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya.

Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, masih banyak ditemukan beberapa kejanggalan. Dalam laporan keuangan masih adanya penyajian data-data yang tidak sesuai, selain itu juga banyak penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Terbukti, menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami penurunan cenderung semakin buruk. Hal ini disebabkan oleh internal control pemerintah daerah masih lemah dan kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang kompeten.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), harus memiliki karakteristik dasar sebagai berikut: keterpahaman (*understandability*), keterandalan (*reliability*), keberpautan (*relevance*), ketepatanwaktuan (*timeliness*), ketaatasasan (*consistency*), dan keterbandingan (*comparability*). Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik dasar yang

telah tercantum dalam standar yang telah ditetapkan dalam hal ini SAP. Pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik tidak akan ragu lagi untuk berbagai kepentingan penggunaannya jika hal tersebut telah terpenuhi, salah satunya penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Akuntabilitas publik merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan karena adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terhadap pemakai. Informasi tersebut dianggap bernilai jika dapat dipahami dan digunakan. Unsur-unsur pembentuk laporan yang bernilai menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat di bandingkan dan (d) dapat dipahami. Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam pelaporan keuangan Pemerintah diperlukan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan laporan keuangan kualitas terbaik. Untuk itu, diperlukan komitmen para penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah mengenai ketentuan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Informasi itu juga agar dapat berguna dan digunakan tentunya informasi tersebut harus dapat dipercaya. Dalam hal ini keterandalan dan ketepatanwaktuan harus dimiliki untuk suatu laporan keuangan selain karakteristik lainnya.

Jika karakteristik keterandalan dan ketepatanwaktuan dari laporan keuangan tersebut terabaikan ataupun belum terpenuhi, maka laporan keuangan tersebut belum menjadi suatu

laporan yang baik. Untuk menjadi suatu laporan keuangan yang baik, karakteristik yang harus ada dalam laporan keuangan itu sendiri harus terpenuhi.

Laporan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari faktor Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena pegawai tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menjadi dasar ukuran keberhasilan pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah. Dalam hal ini pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah terhadap masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemampuan dari pengelola keuangan daerah atau kemampuan pegawai yang berhubungan langsung dengan proses ini merupakan suatu faktor yang dapat sangat berpengaruh terhadap baik atau tidaknya pelaporan keuangan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Sumber Daya Manusia**

Menurut Susilo (2002) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya” dan Kapasitas atau kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Djajendra (Pegawai pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lain dari pemberi kerja atau pengusaha.2012) pegawai adalah sumber daya yang sangat penting dan sangat menentukan suksesnya perusahaan. Pegawai juga selalu disebut sebagai human capital, yang artinya pegawai adalah modal terpenting untuk menghasilkan nilai tambah perusahaan.

Sesuai dengan penjelasan dan definisi yang telah di sebutkan dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai merupakan salah satu hal yang penting. Jika dikaitkan dengan proses awal hingga akhir laporan keuangan, Pegawai berperan aktif sehingga variabel ini menjadi sangat penting. Kemampuan pegawai berhubungan langsung dengan keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah karena merekalah orang-orang yang terlibat langsung

dalam proses penyusunan. Jadi andal atau tidak suatu informasi yang disampaikan dan juga tepat waktu atau tidak pelaporan keuangan ini sangat bergantung kepada pegawai.

## **2.2 Laporan Keuangan Pemerintah**

Berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **2.3 Keterandalan**

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari



pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 karakteristik dari keandalan adalah sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk di sajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

b. Netralitas

Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Jadi kualitas dari laporan keuangan ini merupakan hal yang penting agar tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan ini tinggi. Selain itu, para pemangku kepentingan dapat dengan yakin melangkah dalam hal pengambilan keputusan yang mengacu kepada laporan keuangan.

## **2.4 Ketepatanwaktuan**

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.

Mardiasmo (2002), laporan keuangan disajikan tepat waktu agar dapat di gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosiasl, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan menurut Catrinasari (2006) menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan akan dapat bermanfaat bagi para penggunanya apabila disampaikan dengan tepat waktu.

Sesuai dengan uraian diatas maka ketepakwaktuan pelaporan keuangan merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Dapat dibayangkan jika pelaporan keungan dalam suatu pemerintah daerah terlambat. Maka aliran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah tersebut dapat terhambat dan dapattr berakibat pada kemajuan suatu daerah yang sangat bergantung dengan hal ini

## **2.5 Pengembangan Hipotesis**

### **2.5.1 Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia/Pegawai terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pernyataan dari Susilo (2002) yang menyatakan bahwa “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuanny.”Keterandalan dari suatu pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi agar karakteristik dari keterandalan tersebut terpenuhi.

Pegawai dengan kemampuan yang baik akan senantiasa melaksanakan tugas dengan mengandalkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika kemampuan pegawai tersebut tinggi maka pegawai tersebut akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Hasil penelitian Celviana dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah

daerah. Selain itu, penelitian dari Andriani (2010) menyimpulkan bahwa Kapasitas sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterandalan dari pelaporan ataupun unsur informasi yang terkandung dalam pelaporan keuangan tersebut sangat bergantung pada pegawai yang mengelolanya. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kemampuan Sumber daya manusia/pegawai berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.5.2 Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia/Pegawai terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai (Aditya, 2005).

Seorang pegawai dengan kemampuan yang baik akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan dalam suatu organisasi. Jika kemampuan yang dimilikinya baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan maka batasan waktu yang telah ditentukan dapat terpenuhi sehingga pelaporan keuangan dari SKPD tersebut dapat menjadi tepat waktu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai sangat berhubungan erat dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan karena proses penyusunan hingga pelaporan laporan keuangan dilakukan oleh pegawai. Maka dari itu kemampuan pegawai yang baik diharapkan dapat mendorong pelaporan keuangan yang tepat waktu. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kemampuan Sumber daya manusia/pegawai berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah staf/pegawai bagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah staf keuangan yang ada di Setiap SKPD se-Kabupaten Rejang Lebong yang telah memenuhi syarat sesuai dengan kriteria purposive sampling yaitu:

- 1) Responden adalah pegawai yang bekerja di bagian keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat daerah se-Kabupaten Rejang Lebong yang terlibat langsung dalam penyusunan Laporan Keuangan.
- 2) Pegawai yang telah memiliki pengalaman minimal selama 2 tahun dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.2.1 Kemampuan Sumber Daya Manusia/Pegawai (X)**

Kemampuan sumber daya manusia/pegawai adalah kemampuan seorang pegawai baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya guna mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Hal ini bisa dilihat dari tanggung jawab yang diemban dan kompetensi yang dimiliki. Variabel kemampuan sumber daya manusia/pegawai dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian Celviana dan Rahmawati (2010) yang telah dimodifikasi dan dengan menambahkan beberapa pertanyaan.

##### **3.2.2 Keterandalan (Y<sub>1</sub>)**

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Indikator yang digunakan yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lengkap, benar, dapat diverifikasi (diuji), dan netral. Variabel

keterandalan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian Celviana dan Rahmawati (2010) yang telah dimodifikasi.

### 3.2.3 Ketepatanwaktuan ( $Y_2$ )

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mengindikasikan dengan jelas periode pelaporan. Variabel Ketepatanwaktuan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Celviana dan Rahmawati (2010) yang telah dimodifikasi.

### 3.3 Metode Pengujian Hipotesis

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi sederhana yang menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan dua persamaan yaitu sebagai berikut :

#### Persamaan 1:

$$Y_1 = a_1 + b_1X$$

#### Persamaan 2:

$$Y_2 = a_2 + b_2X$$

Dimana:

$Y_1$  = variabel tak bebas/ terikat (Keterandalan)

$Y_2$  = variabel tak bebas/ terikat (Ketepatanwaktuan)

$X$  = variabel bebas (Kinerja Pegawai)

$a_1$  = konstanta (*intersept*)<sub>1</sub>

$b_1$  = koefisien regresi/ nilai parameter

$a_2$  = konstanta (*intersept*)<sub>2</sub>

$b_2$  = koefisien regresi/ nilai parameter<sub>2</sub>

## 4. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diedarkan langsung pada setiap SKPD yang menjadi tempat penelitian. Kuesioner diedarkan dari tanggal 27 Juli – 17 September 2012.

Total kuesioner yang disebarakan dalam penelitian ini berjumlah 72 kuesioner. Dari 72 (100%) kuesioner yang disebarakan 63 (87,50%) kuesioner diterima kembali, 9 (12,50%) kuesioner tidak kembali. Dari 63 (100%) kuesioner yang diterima, 55 (87,30%) dapat diolah dan 8 (12,70%) tidak dapat diolah karena masa kerja dari responden kurang dari 2 tahun dan bukan staf bagian keuangan, sehingga kriteria *purposive sampling* yang telah ditentukan tidak terpenuhi.

### 4.2 Statistik Deskriptif

Data yang telah terkumpul dari kuesioner yang disebarakan ditabulasi dengan tujuan sebagai alat analisis data. Hasil tabulasi tersebut diolah menggunakan program SPSS yang menghasilkan deskripsi statistik variabel penelitian, seperti yang tampak pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Statistik Responden**

	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Aktual	Mean	Std. Deviation
Sumber daya manusia/Pegawai (X)	55	10 – 50	20 – 46	33,67	5,43
Keterandalan (Y <sub>1</sub> )	55	12 – 60	22 – 56	43,95	6,843
Ketepatanwaktuan (Y <sub>2</sub> )	55	6 – 30	11 – 29	23,15	4,373

*Sumber : Data primer diolah, 2012*

### 4.3 Hasil Uji Kualitas data

Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Pengujian Validitas**

Nama Variabel	<i>Pearson Correlation</i> (Validitas)	Status
Sumber daya manusia/Pegawai (X)	0,433** - 0,610**	Valid
Keterandalan ( Y <sub>1</sub> )	0,396** - 0,683**	Valid
Ketepatanwaktuan (Y <sub>2</sub> )	0,402**- 0,776**	Valid

\*\* *Correlation is significant at the 0.01 level*

Sumber: Data primer diolah, 2012

Hasil uji validitas diatas menunjukkan *pearson correlation* untuk setiap variabel yaitu: Sumber daya manusia/Pegawai (X), Keterandalan(Y<sub>1</sub>) dan Ketepatanwaktuan (Y<sub>2</sub>) signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diharapkan.

### 4.4. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

Nama Variabel	<i>Pearson Correlation</i> (Validitas)	Status
Sumber daya manusia/Pegawai (X)	0,641	Reliabel
Keterandalan ( Y <sub>1</sub> )	0,762	Reliabel
Ketepatanwaktuan (Y <sub>2</sub> )	0,704	Reliabel

Sumber: Data pimer diolah, 2012

Berdasarkan hasil pegujian reliabilitas pada Tabel 4.3 di atas, Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) untuk masing-masing variabel adalah lebih besar

dari 0,60, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-masing variabel adalah reliabel.

#### 4.5. Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada table 4.4 dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

Nama Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Sumber daya manusia/Pegawai (X)	0,725	0,67	Normal
Keterandalan ( Y <sub>1</sub> )	1,035	0,234	Normal
Ketepatanwaktuan (Y <sub>2</sub> )	0,919	0,367	Normal

Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan hasil pegujian normalitas pada Tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.

#### 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

##### 4.6.1 Pengujian Hipotesis Pertama (H<sub>1</sub>)

**Tabel 4.5**  
**Hasil Regresi Sederhana H<sub>1</sub>**

Variabel	Koefisien	t	Nilai P (Sig)	Kesimpulan
Konstanta	17,635	3,087	0	
Sumber daya manusia/Pegawai	0,781	5,753	0	Berpengaruh positif
Adjusted R Square : 0,373      F: 33,092				
Y <sub>1</sub> : Keterandalan				

Sumber : Data diolah, 2012



Dari tabel 4.5 diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,373, hal ini menunjukkan bahwa 37,3% variabel Keterandalan dijelaskan oleh variabel Sumber daya manusia/Pegawai. Untuk sisanya sebesar 63,7% dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model.

Nilai p value dalam tabel 4.6 tersebut adalah sebesar 0,000. Jika nilai p value < 0,05 yang berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Sumber daya manusia/Pegawai berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah” diterima. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Sumber daya manusia/Pegawai SKPD berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

#### 4.6.2 Pengujian Hipotesis Kedua (H<sub>2</sub>)

Hipotesis pertama (H<sub>2</sub>) dalam penelitian ini adalah “Sumber daya manusia/Pegawai Berpengaruh Positif terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.6

**Tabel 4.6**  
**Hasil Regresi Sederhana H<sub>2</sub>**

Variabel	Koefisien	t	Nilai P (Sig)	Kesimpulan
Konstanta	7,122	2,34	0,023	
Sumber daya manusia/Pegawai	0,476	5,331	0	Berpengaruh positif
Adjusted R Square : 0,337    F: 28,420    P: 0,000				
Y <sub>2</sub> : Ketepatanwaktuan				

*Sumber : Data diolah, 2012*

Dari tabel 4.6, diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,337, hal ini menunjukkan bahwa 33,7% variabel Ketepatanwaktuan dijelaskan oleh variabel Sumber daya manusia/Pegawai. Untuk sisanya sebesar 67,3% dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model.

Nilai p value dalam tabel 4.6 tersebut adalah sebesar 0,000. Jika nilai p value  $< 0,05$  yang berarti bahwa kedua yang menyatakan “Sumber daya manusia/Pegawai berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah” diterima. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Sumber daya manusia/Pegawai SKPD berpengaruh positif terhadap Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

## **4.7 Pembahasan**

### **4.7.1 Pengaruh Kemampuan Sumber daya manusia/Pegawai Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kemampuan pegawai merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya guna mencapai suatu tujuan. Pegawai SKPD bagian keuangan dengan kinerja yang baik pasti akan mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya agar dapat menghasilkan suatu output yang berkualitas yaitu suatu laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP. Salah satu karakteristik dari pelaporan keuangan yang berkualitas adalah nilai informasi dalam laporan keuangan tersebut andal yaitu informasi yang disajikan valid.

Jika pegawai SKPD memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya, maka diharapkan akan menghasilkan output yang baik yaitu terciptanya keterandalan dari laporan keuangan. Hal ini dikarenakan keterandalan pelaporan keuangan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan dari pengelola laporan keuangan itu sendiri yaitu pegawai SKPD.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan sumber daya manusia/pegawai memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai SKPD Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemampuan yang baik sehingga kriteria andal dari laporan keuangan dapat terpenuhi. Semakin baik Kemampuan sumber daya

manusia/Pegawai SKPD maka semakin andal laporan keuangan yang akan dihasilkan begitu pula sebaliknya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Celviana dan Rahmawati (2010), Andriani(2010) dan Hartina (2009). Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosidi(2010) dan Indriasari dan Ertambang (2007). Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

#### **4.7.2 Pengaruh Kemampuan Sumber daya manusia/Pegawai Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan dapat dilaporkan jika laporan tersebut telah selesai dan siap untuk dilaporkan. Laporan tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai SAP yaitu keterpahaman, keterandalan, keberpautan, ketepatanwaktuan, ketaatasassan dan keterbandingan. Untuk dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut peranan pegawai SKPD selaku pengelola dan penyusun laporan keuangan sangatlah penting.

Pegawai SKPD dengan kemampuan yang baik akan dapat menyelesaikan tugas-tugas terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pegawai tersebut telah mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga laporan keuangan tersebut dapat selesai tepat waktu.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan sumber daya manusia/pegawai memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pegawai SKPD Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemampuan yang baik sehingga ketepatan waktu dari pelaporan laporan keuangan dapat terpenuhi. Semakin baik kemampuan sumber daya manusia/pegawai SKPD maka pelaporan laporan keuangan akan menjadi tepat waktu.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2007), Hartina (2009) dan Andriani(2010). Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriasari dan Ertambang (2007), Rosidi(2010) dan Celviana dan Rahmawati (2010). Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa Sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia atau pegawai SKPD dapat mempengaruhi keterandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini

menunjukkan bahwa kemampuan dari sumber daya manusia atau pegawai SKPD dapat mempengaruhi ketepatan waktu dari pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **5.2 Implikasi Hasil Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pegawai SKPD Kabupaten Rejang Lebong terutama bagian keuangan agar dapat melaksanakan penyusunan laporan keuangan secara andal dan tepat waktu.
2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan memperkaya penelitian dalam bidang akuntansi sektor publik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

## **5.3 Keterbatasan Penelitian**

1. Kuesioner untuk variabel kemampuan sumber daya manusia dalam penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan seperti indikator terperinci untuk menentukan tingkat kemampuan dari sumber daya manusia belum terlalu lengkap.

2. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel kemampuan sumber daya manusia atau pegawai. Sehingga masih ada variabel lain yang mempengaruhi dan dapat ditambahkan ke penelitian selanjutnya.

#### **5.4 Saran**

1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan melengkapi indikator-indikator pada kuesioner kemampuan sumber daya manusia, agar butir pertanyaan pada kuesioner lebih terperinci untuk menentukan tingkat kemampuan dari sumber daya manusia.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti pengendalian internal akuntansi dan sistem informasi keuangan daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akuntan Indonesia (2009). Laporan Keuangan Daerah, Mengapa Mutu Laporan Keuangan Daerah Menurun? Pemerintah Daerah Belum Paham Akuntansi? Penerapan SAP Baru Kulit Luarnya.
- Antaraneews.com, Senin, 19 September 2011. Kualitas laporan keuangan negara perlu ditingkatkan. (Diakses pada 15 Maret 2012) Tersedia di word wide web : antaraneews.com
- Celviana dan Rahmawati (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten). [www.SNA13Purwokerto.com](http://www.SNA13Purwokerto.com).
- Djajendra (2010). Karyawan adalah modal perusahaan?. (Diakses pada 15 Maret 2012) Tersedia di word wide web : [djajendra-motivator.com](http://djajendra-motivator.com)
- Gibson, J.L. et. Al (1996). Organisasi Dan Manajemen, Erlangga, Terjemahan, Jakarta.

Hartina S. (2009) Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Indriasari dan Ertambang (2007). pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir).

Khairulfaiz.blogspot.com, 20 Mei 2011. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Ed. II. Yogyakarta : Andi

Okezone.com, Rabu, 9 November 2011. Mendagri Kritik Buruknya Pelaporan Keuangan Daerah. (Diakses pada 12 Maret 2012) Tersedia di word wide web : okezone.com

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

-----, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

-----, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

-----, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

-----, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

-----, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 40.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

-----, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Riduwan, 2008, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung.

Santiadji S. Rosidi (2010). Analisis Faktor –faktor yang Berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari.

Siagian, S.P. (1993). Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Perspektif Kultur Dan Struktur, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Silka Hartina (2009). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada pemerintah Kabupaten Langkat.

- Sugiyono.(2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Susilo (2010), Pengaruh tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.(Studi Empiris Di Pemda Sragen).
- Sumiyati (2006), Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam masa Transisi. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1, Mei 2006. Hal 19 – 52.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPF, Yogyakarta
- Thomas S. Kaihatu (2006). *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol.8, No. 1, Maret 2006: 1-9.
- Wihandaru SP (2009). Analisis Reresi Linear. Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wikipedia (2012).Ketepatanwaktuan. (Diakses pada 20 Maret 2012) Tersedia di word wide web :[www.Wikipedia.com/Ketepatanwaktuan](http://www.Wikipedia.com/Ketepatanwaktuan)
- ,. Keterandalan. (Diakses pada 20 Maret 2012) Tersedia di word wide web :[www.Wikipedia.com/Keterandalan](http://www.Wikipedia.com/Keterandalan)
- Wiwik Andriani (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan ).
- Zainul, Handono dkk (2008).Hubungan Kinerja Karyawan Tata Usaha dengan Kepuasan Dosen di Politeknik Kesehatan Palu.